

ABSTRAK

Dana desa merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota, ditujukan untuk mendorong kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ketidaklengkapan realisasi program pemberdayaan tersebut. Penelitian menggunakan dua teknik, yaitu purposive sampling untuk informan kunci yang terdiri atas aparatur gampong serta accidental sampling untuk informan tambahan dari kalangan masyarakat umum yang ditemui di lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, serta kondisi sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa di Gampong Meunasah Alue telah dijalankan melalui mekanisme perencanaan partisipatif berjenjang, namun belum berjalan secara optimal. Dari tiga program pemberdayaan yang direncanakan, satu program yaitu peningkatan produksi peternakan tidak terealisasi. Terdapat tiga faktor penghambat utama: pertama, lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi teknis dan tidak adanya standar pengukuran outcome, kedua, rendahnya kesadaran masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, kerentanan anggaran akibat bencana banjir yang memangkas hampir 50% alokasi, serta kekosongan pengurus BUMG selama dua tahun, ketiga, orientasi masyarakat yang lebih memilih bantuan langsung jangka pendek daripada program pemberdayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, dana desa, pemberdayaan masyarakat, van meter dan van horn

ABSTRACT

Village Funds are a strategic policy instrument of the central government sourced from the State Budget (APBN) and disbursed through regency/municipal budgets (APBD), aimed at promoting village self-reliance through governance administration, development, and community empowerment. In practice, however, the implementation of Village Funds in various regions still faces a range of challenges that hinder the optimal achievement of empowerment objectives. This study aims to describe the implementation of Village Funds in community empowerment in Gampong Meunasah Alue, Muara Dua Subdistrict, Lhokseumawe City, and to identify the inhibiting factors behind the incomplete realization of the empowerment programs. The study employed two sampling techniques: purposive sampling for key informants consisting of village officials, and accidental sampling for additional informants from the general public encountered in the field. Data analysis was conducted using the Van Meter and Van Horn theory, which encompasses three main dimensions: policy standards and objectives, resources, and socio-economic conditions. The findings indicate that the implementation of Village Funds in Gampong Meunasah Alue has been carried out through a tiered participatory planning mechanism, but has not yet run optimally. Of the three empowerment programs planned, one the livestock production improvement program was not realized. Three main inhibiting factors were identified: first, officials' weak understanding of technical regulations and the absence of outcome measurement standards; second, low community awareness as the subject of empowerment, budget vulnerability due to flooding that cut nearly 50% of the allocation, and a two-year vacancy in BUMG (Village-Owned Enterprise) management; and third, the community's tendency to prefer short-term direct assistance over sustainable, long-term empowerment programs.

Keywords: *Policy implementation, village fund, community empowerment, van meter and van horn*